

2023



BerAKHLAK
BerAKHLAK BerAKHLAK BerAKHLAK BerAKHLAK BerAKHLAK

#bangga
melayani
bangsa

LAPORAN KEUANGAN SEMESTER 2 TAHUN 2023

AUDITED

**BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN PENYULUHAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
MAROS, 2023**

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan audited berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan audited Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Maros, 8 Mei 2024

Kepala Balai Riset Perikanan Budidaya
Air Payau dan penyuluhan Perikanan



Dr. A. Indra Jaya Asaad, S.Pi, M.Sc
NIP. 197707112005021001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	1
II. Neraca	1
III. Laporan Operasional	1
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	2
V. Catatan atas Laporan Keuangan	2
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	23
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	32
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	50
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	59
F. Pengungkapan Penting Lainnya	63
VI. Lampiran dan Daftar	64



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU
DAN PENYULUHAN PERIKANAN**

JALAN MAKMUR DG.SITAKKA NO.129 MAROS 90512
TELEPON (0411) 371544, FAKSIMILI (0411) 371545

LAMAN: www.bppbapmaros.kkp.go.id POS ELEKTRONIK: litkanta@indosat.net.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan audited Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi serta kinerja keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Maros, 8 Mei 2024

Kepala Balai Riset Perikanan Budidaya
Air Payau dan Penyuluhan Perikanan,



Dr. A. Indra Jaya Asaad, S.Pi, M.Sc
NIP. 1971 0901 199203 2 002

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan Semester II Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN (Audited)

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara Semester II tahun 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1.401.854.890 atau mencapai 261,05 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp537.000.000.

Realisasi Belanja Negara pada Semester II TA 2023 adalah sebesar Rp102.485.602.584 atau mencapai 99,83 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp102.660.245.000.

NERACA (Audited)

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada Semester II Tahun 2023. Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp480.971.940.852 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp243.221.942; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp476.333.250.464; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp571.651.468.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp106.621.118 dan Rp477.041.502.756.

LAPORAN OPERASIONAL (Audited)

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.394.414.889, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp110.547.438.896 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp109.153.024.007. Surplus dari Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp7.440.001 dan Rp109.145.584.006 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp109.145.584.006

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (Audited)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp483.848.745.234 ditambah Defisit-LO sebesar Rp109.145.584.006 kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp1.254.593.834 dan Transaksi Antar Entitas senilai Rp101.083.747.694 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp477.041.502.756.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Semester II Tahun 2023 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED***(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	31-Des-23		Realisasi Di Atas (Bawah) Anggaran	% thd Angg	31-Des-22
		ANGGARAN	REALISASI			REALISASI
PENDAPATAN Negara dan Hibah						
Pendapatan Negara Bukan Pajak	B.1	537.000.000	1.401.854.890	(864.854.890)	261,05	480.681.515
JUMLAH PENDAPATAN dan Hibah		537.000.000	1.401.854.890	(864.854.890)	261,05	480.681.515
BELANJA	B.2.					
Belanja Pegawai	B.3	76.940.739.000	76.782.169.626	158.569.374	99,79	60.877.435.276
Belanja Barang	B.4	25.719.506.000	25.703.432.958	16.073.042	99,94	10.747.919.722
Belanja Modal	B.5	-	-	-	0,00	-
JUMLAH BELANJA		102.660.245.000	102.485.602.584	174.642.416	99,83	71.625.354.998

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA**Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan
NERACA****PER 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022 - AUDITED***(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	31-Des-23	31-Des-22
ASET			
ASET LANCAR	C.1		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.1.4	10.965.416	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih_Piutang Bukan Pajak	C.1.7	(54.827)	-
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)		10.910.589	-
Persediaan	C.1.10	232.311.353	494.030.348
Jumlah Aset Lancar		243.221.942	494.030.348
ASET TETAP	C.2		
Tanah	C.2.1	283.798.727.500	283.798.727.500
Peralatan dan Mesin	C.2.2	30.358.608.503	30.417.795.503
Gedung dan Bangunan	C.2.3	126.318.570.439	125.398.083.339
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2.4	107.731.192.754	107.266.819.200
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	745.515.000	745.515.000
Konstruksi dalam pengerjaan	C.2.6	122.384.000	122.384.000
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.7	(72.741.747.732)	(64.892.117.626)
Jumlah Aset Tetap		476.333.250.464	482.857.206.916
ASET LAINNYA	C.4		
Aset Tak Berwujud	C.4.1	686.788.265	686.788.265
Aset lain lain	C.4.2	2.534.814.350	2.626.555.350
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.4.3	(2.649.951.147)	(2.675.891.504)
Jumlah Aset Lainnya		571.651.468	637.452.111
JUMLAH ASET		477.148.123.874	483.988.689.375
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C.5		
Utang pada Pihak Ketiga	C.5.1	106.621.118	139.944.141
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.5.2	-	-
Uang Muka dari KPPN	C.5.3	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN		106.621.118	139.944.141
EKUITAS			
Ekuitas	C.7	477.041.502.756	483.848.745.234
JUMLAH EKUITAS		477.041.502.756	483.848.745.234
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		477.148.123.874	483.988.689.375

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31-Des-23	31-Des-22
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	1.394.414.889	633.009.451
JUMLAH PENDAPATAN		1.394.414.889	633.009.451
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	76.759.427.829	81.636.538.606
Beban Persediaan	D.3	1.386.424.290	897.684.468
Beban Barang Jasa	D.4	18.087.719.264	14.094.749.754
Beban Pemeliharaan	D.5	4.532.553.940	1.659.235.529
Beban Perjalanan Dinas	D.6	1.953.427.817	814.180.594
Beban Barang untuk Diserahkan kepada	D.7	-	50.000
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	7.827.830.929	8.579.573.133
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	(54.827)	(27.554)
Beban Lain-lain	D.11	-	-
JUMLAH BEBAN		110.547.438.896	107.681.984.530
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(109.153.024.007)	(107.048.975.079)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/defisit pelepasan aset non lancar	D.12	7.440.001	450.000
Pendapatan pelepasan aset non lancar		7.440.001	450.000
Beban pelepasan aset non lancar		-	-
Surplus/defisit Kegiatan Non Operasional lainnya		-	106.529.590
Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya		-	106.529.590
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL Lainnya		7.440.001	106.979.590
SURPLUS/DEFISIT Kegiatan Non Operasional		(109.145.584.006)	(106.941.995.489)
POS LUAR BIASA			
Pendapatan PNB	D.13	-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(109.145.584.006)	(106.941.995.489)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 31
DESEMBER 2022***(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	31-Des-23	31-Des-22
EKUITAS AWAL	E.1	483.848.745.234	492.200.635.688
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(109.145.584.006)	(106.941.995.489)
Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	E.4	1.254.593.834	65.012.238
PENYESUAIN NILAI ASET	E.4.1	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.4.2	-	28.920.628
KOREKSI Atas Reklasifikasi	E.4.3	-	-
Selisih Revaluasi Aset	E.4.4	-	-
KOREKSI Nilai aset Non Revaluasi	E.4.5	1.254.593.834	36.091.610
KOREKSI Lain-Lain	E.4.6	-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	101.083.747.694	98.525.092.797
kenaikan/penurunan ekuitas		(6.807.242.478)	(8.351.890.454)
EKUITAS AKHIR		477.041.502.756	483.848.745.234

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Riset Perikanan

Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana Strategis*

Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor 2005/BALAP.007/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal dan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Entitas berkedudukan di Jalan Makmur Dg. Sitakka No.129, Maros.

Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan merupakan amanah dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 29/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan. Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan di bidang riset perikanan budidaya air payau dan penyuluhan perikanan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan.

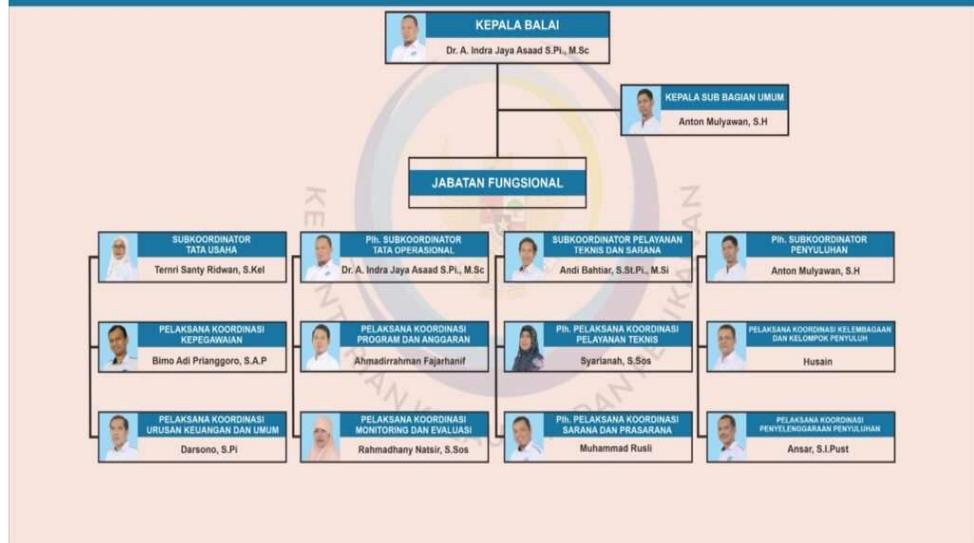
A.1.1. Struktur Organisasi

Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan (BRPBAPPP) berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No : 75/PERMEN-KP/2020 adalah Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan di bidang riset perikanan budidaya air payau dan penyuluhan perikanan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada badan yang menangani riset kelautan dan perikanan serta pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan riset perikanan budidaya air payau dan penyuluhan perikanan



STRUKTUR ORGANISASI

BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU
DAN PENYULUHAN PERIKANAN



Gambar 1. Struktur Organisasi BRPBAPPP

Berdasarkan struktur organisasi maka Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dan laporan;
- Penyusunan kebutuhan peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil (PNS), Swadaya, dan Swasta;
- Pengelolaan prasarana sarana riset perikanan budidaya air payau dan penyuluhan perikanan; dan
- Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan (BRPBAPPP) dipimpin oleh seorang Kepala. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Balai dibantu oleh Kepala Subbagian Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Kepala Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan

Perikanan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Dalam pelaksanaan tugas, ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan.

Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan masing-masing sesuai dengan bidang tugas Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas Koordinator Pelaksana Fungsional Pelayanan Fungsional diatur dengan Peraturan Menteri.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan analisis beban kerja. Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan harus Menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi lingkup Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan. Kepala Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan menyampaikan laporan kepada kepala badan yang menangani riset dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan harus menyusun peta jabatan berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan lingkup Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan. Setiap unsur di lingkup Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi,

integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkup Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Setiap pimpinan pada unit organisasi Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan langsung dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

A.1.2 SDM BRPBAPPP

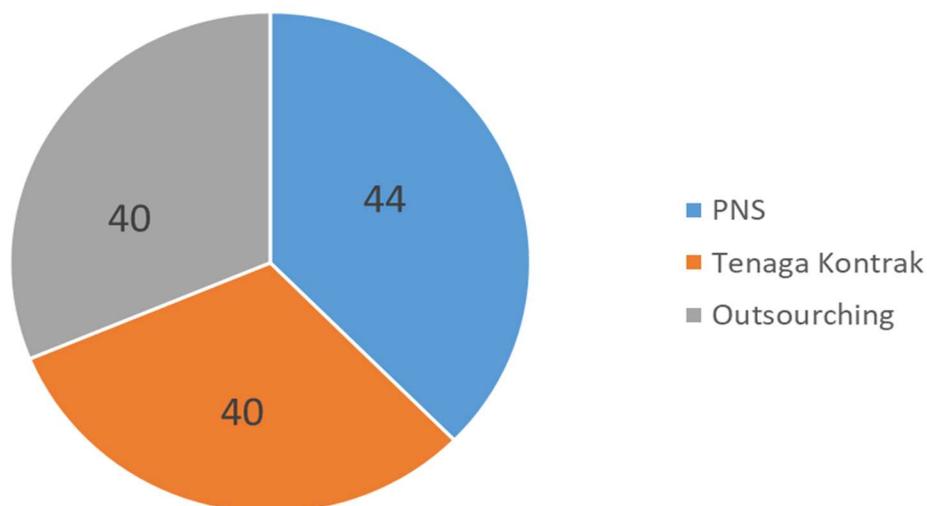
Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan (BRPBAPPP) merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di bidang riset perikanan budidaya air payau dan penyuluhan perikanan sesuai dengan PERMEN KP 75/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BRPBAPPP. BRPBAPPP mengemban tugas sebagai balai riset perikanan budidaya air payau dan sebagai balai penyuluhan perikanan yang memiliki wewenang sebagai Satuan Administrasi Pangkalan (Satminkal) penyuluhan perikanan yang terdiri dari 47 kabupaten/kota di 3 Provinsi, yaitu: Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat.

Dalam rangka mengakselerasi tugas BRPBAPPP tersebut, masing-masing pegawai/pejabat harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara maksimal. Masing-masing jabatan memerlukan kualifikasi tertentu dalam hal pengetahuan dan keterampilan, oleh karena itu perlu upaya peningkatan SDM melalui pendidikan formal dan non formal diantaranya diklat, seminar, bimbingan teknis maupun sosialisasi sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan. Administrasi dan pengelolaan kepegawaian juga juga dituntut melakukan tugas pokok dan fungsinya secara cermat, untuk mendukung administrasi dan karier kinerja PNS berdasarkan sistem merit. Dalam sistem merit ini, beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian antara lain: tanggal/bulan pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, kenaikan gaji berkala, program pengembangan pegawai melalui tugas belajar, ijin belajar, pelatihan jabatan, pelatihan dan pendidikan keterampilan.

Sistem pengadministrasian di kepegawaian dilakukan secara tepat sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sehingga administrasi pegawai dapat terdokumentasikan dengan baik dan data kepegawaian dapat tersaji secara tepat, baik dan akurat.

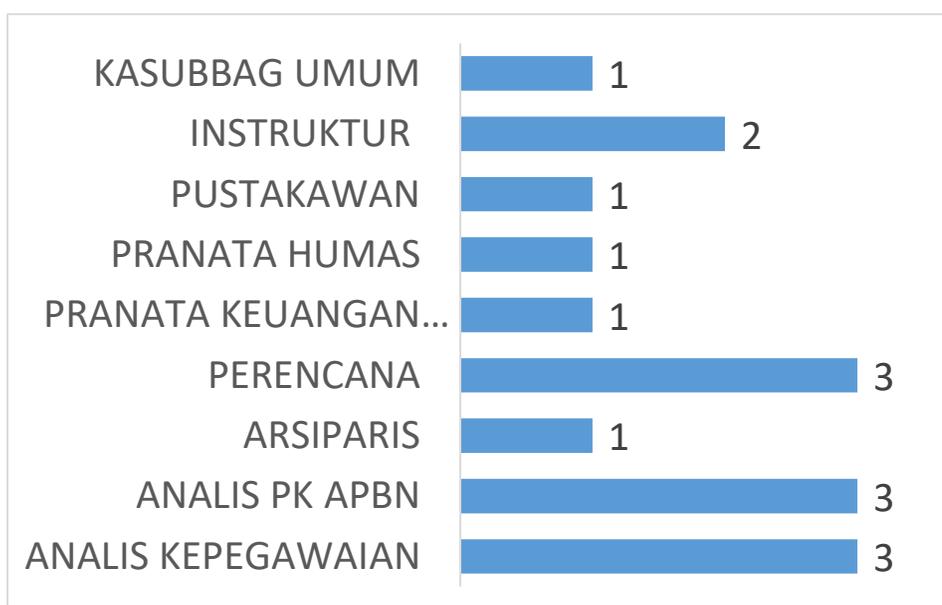
Kinerja suatu unit kerja dapat dicapai dengan optimal apabila masing-masing pegawai/pejabat melaksanakan tugas secara maksimal. Masing-masing jabatan memerlukan kualifikasi tertentu dalam hal pengetahuan dan keterampilan, maka perlu upaya peningkatan SDM melalui pendidikan non formal diantaranya diklat, bimbingan teknis maupun sosialisasi sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan. Dukungan sumber daya manusia pada program/kegiatan riset dan sumberdaya manusia kelautan dan perikanan mutlak sangat diperlukan. Pegawai BRPBAPPP memiliki berbagai latar belakang pendidikan dari tingkat dasar (SD). sampai dengan pasca sarjana (S3) yang ditempatkan di Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan Maros, Instalasi Riset Maranak, Instalasi Perbenihan Budidaya Udang Windu di Barru dan Instalasi Tambak Percobaan di Punaga Takalar Jumlah pegawai Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan (BRPBAPPP) Maros pada bulan maret tahun 2023 sebanyak 388 orang yang terdiri dari 44 orang PNS Manajerial, PNS Penyuluh Perikanan 388 orang dan P3K Penyuluh sebanyak 39 orang, dan Penyuluh Perikanan Bantu sebanyak 195 orang. Masing-masing pegawai tersebut ditempatkan di Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan Maros, Instalasi Riset Maranak, Instalasi Riset Perbenihan Budidaya Udang Windu Di Barru dan Instalasi Tambak Percobaan di Punaga Takalar Sedangkan para penyuluh perikanan tersebar di 3 Provinsi yaitu Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Sulawesi

Tenggara

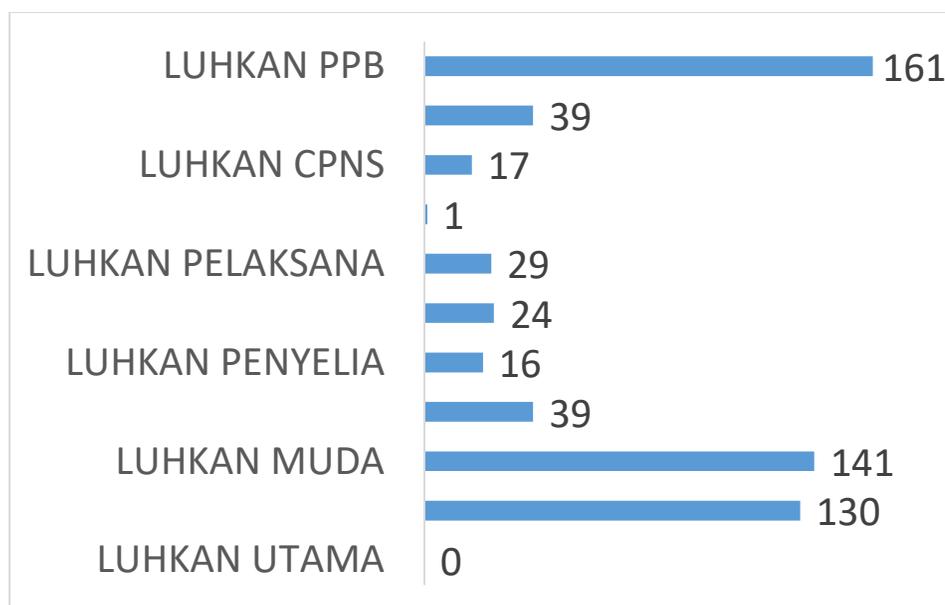


Grafik 1. Data Kepegawaian Bulan Maret 2023

Berdasarkan data kepegawaian pada bulan Maret 2023 total SDM BRPBAP-PP sebanyak 471 orang. Sebaran Outsourcing terdiri dari 17 orang Manajerial dan Laboratorium, 4 orang Driver, 2 orang Satpam, 17 orang Cleaning Service.



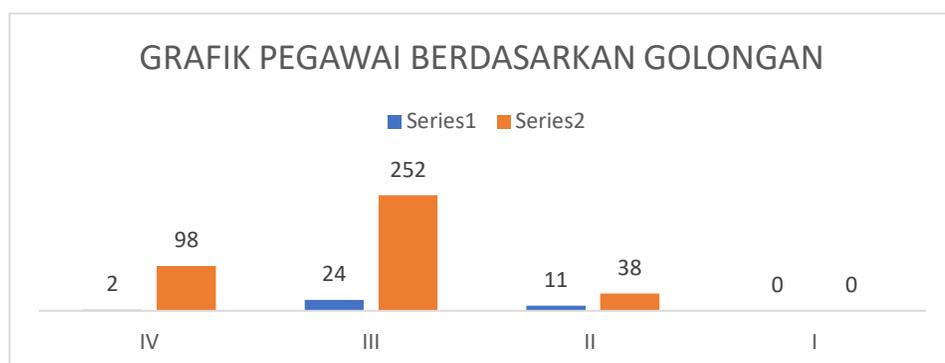
Grafik 2. Jabatan Fungsional Umum: 18 orang



Grafik 3. Total Luhkan PNS : 381 orang dan Total Luhkan CPNS : 17 orang

a. Menurut Golongan

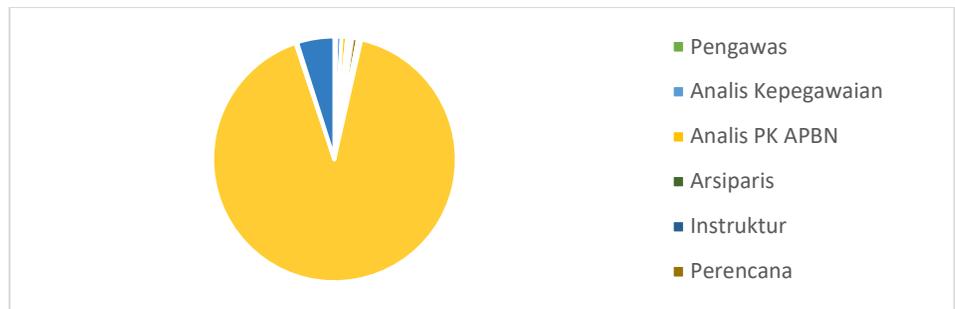
Jumlah pegawai menurut golongan: Golongan IV sebanyak 100 orang (2 orang riset dan 98 orang penyuluh), Golongan III sebanyak 276 orang (24 orang riset dan 252 orang penyuluh), Golongan II sebanyak 49 orang (11 orang riset dan 38 orang penyuluh), dan Golongan I tidak ada.



Grafik 4. Jumlah Pegawai Menurut Golongan

b. Menurut Struktural dan Fungsional

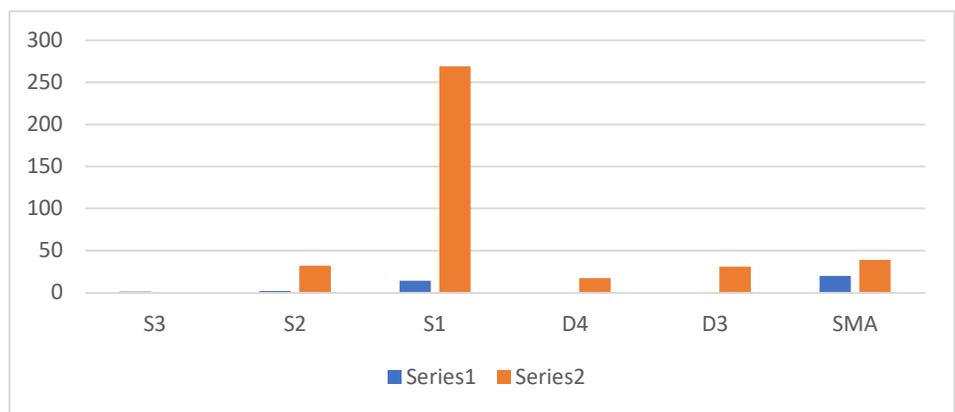
Jumlah pegawai menurut jabatan: Jabatan Pengawas (Struktural) 1 orang, Analis Kepegawaian 3 orang, Analis PK APBN 3 orang, Arsiparis 1 orang, Instruktur 2 orang, Perencana 3 orang, Pranata Humas 1 orang, Pranata Keuangan APBN 1 orang, Penyuluh Perikanan 388 orang Pustakawan 1 orang, dan Fungsional Umum 21 orang.



Grafik 5. Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

c. Menurut Pendidikan

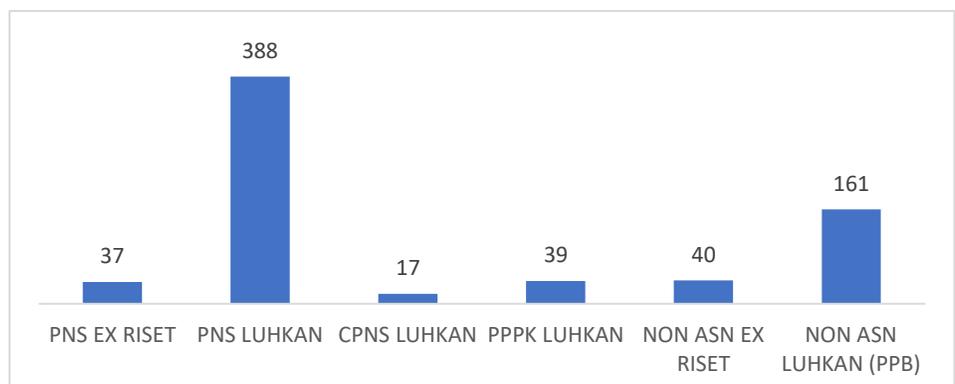
Rincian jumlah pegawai berdasarkan pendidikan adalah sebagai berikut : S3 sebanyak 1 orang, S2 sebanyak 34 orang, S1/D4 sebanyak 300 orang, D3 sebanyak 31 orang, SLTA sebanyak 59 orang.



Grafik 6. Grafik Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan

d. Menurut Status Kepegawaian

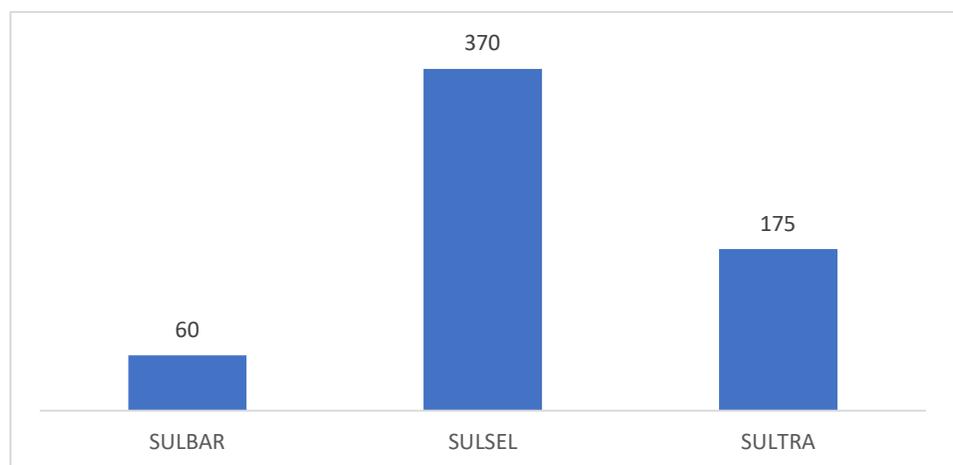
Jumlah pegawai menurut status kepegawaian sebanyak 682 orang yang terdiri dari: CPNS/PNS sebanyak 442 orang yang terdiri dari 37 orang dari ex riset dan sebanyak 405 orang dari penyuluhan; PPPK sebanyak 39 orang dari penyuluhan; Tenaga Kontrak sebanyak 201 orang yang terdiri dari 40 orang pegawai kontrak dari ex riset dan sebanyak 161 orang PPB (Penyuluh Perikanan Bantu).



Grafik 7. Grafik Jumlah Pegawai Menurut Status Kepegawaian

e. Persebaran Penyuluh

Jumlah Penyuluh Perikanan (ASN dan PPB) secara keseluruhan ada 605 orang, dengan rincian Penyuluh Perikanan ASN di setiap wilayah penyebarannya adalah sebagai berikut : Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 281 orang, Provinsi Sulawesi Tenggara sebanyak 127 orang, Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 36 orang serta Jumlah Penyuluh Perikanan Bantu (PPB) sebanyak 161 orang terdiri dari wilayah Sulawesi Selatan sebanyak 89 orang, wilayah Sulawesi Tenggara sebanyak 48 orang dan Sulawesi Barat sebanyak 24 orang.



Grafik 8. Grafik Jumlah Penyuluh Berdasarkan Wilayah Penyebarannya

A.1.3 Aset/ Sarana Prasarana



Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari

pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

A.3 Basis Akuntansi

Basis Akuntansi

Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pererintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah, transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester II Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konsekuensi-konsekuensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan **Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan** adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA **(1) Pendapatan-LRA**

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan LO **(2) Pendapatan-LO**

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan

Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode sewa.

Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber.

Belanja

(3) Belanja

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ,

Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa,

Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

Aset

5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya

Aset Lancar

a. Aset Lancar

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca,

Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

. Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan Ganti Rugi, apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah

dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal, Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan

harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;

harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya

Aset Tetap

b. Aset Tetap

Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar

Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);

Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya, kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.

Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

Tanah;

Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan

Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tatel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya,

Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil, sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2021 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Software	4 tahun
Franchise	5 tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 tahun
Hak Ekonomi, Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70 tahun

Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

Kewajiban Pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan memperoleh alokasi anggaran Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp102.660.245.000. Selama Semester II tahun 2023, dilakukan revisi atas DIPA Awal BRPBAPPP yang disebabkan adanya realokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan berupa penambahan anggaran kegiatan Smart Fisheries Village yang berasal dari Pemanfaatan PNBPNP. Anggaran awal dan anggaran setelah revisi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Rincian Perubahan DIPA Tahun Anggaran 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2023	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan PNBPNP	537.000.000	537.000.000
Jumlah Pendapatan	537.000.000	537.000.000
Belanja		
Belanja Pegawai	78.958.975.000	76.940.739.000
Belanja Barang	23.567.240.000	25.719.506.000
Belanja Modal		
Belanja Bantuan Sosial		
Jumlah Belanja	102.526.215.000	102.660.245.000

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan
Rp1.047.308.409

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1,401,854,890 atau mencapai 261,05 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp537.000.000. Pendapatan di satuan kerja Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan terdiri dari Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin, Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan, Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi, Pendapatan

Penelitian/riset, survey, pemetaan, dan pengembangan iptek Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Semester I TA 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2023		
	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan penjualan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan budidaya	381.950.000	1.062.134.310	278,08
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	0	39.534.600	0
Pendapatan penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tuisi	4.000.000	143.378.000	3584
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	35.000.000	47.700.979	136,28
Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin	-	7.440.001	-
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi Lainnya	116.050.000	101.667.000	87,60
Jumlah	537.000.000	1.401.854.890	261,05

Realisasi pendapatan BRPBAPPP dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Pendapatan Penjualan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan budidaya dimana estimasi pendapatannya sebesar Rp.381.950.000 dengan realisasi sebesar Rp. 1.062.134.310
- Pendapatan Pengujian, sertifikasi, Kalibrasi dan Standardisasi lainnya sebesar Rp.101.667.000
- Pendapatan Sewa, Gedung dan Bangunan senilai Rp. 47.700.979
- Pendapatan penjualan peralatan dan mesin Rp. 7.440.001.
- Pendapatan penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tuisi sebesar Rp.143.378.000

- Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya sebesar Rp.39.534.600

Keseluruhan pendapatan yang diterima BRPBAPPP merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan telah ditatausahakan oleh bendahara penerimaan dan di setorkan ke kas Negara baik melalui surat bukti setoran pajak maupun dengan pemotongan surat perintah membayar. Merujuk pada aturan penyetoran PNBP, satker BRPBAPPP telah menggunakan aplikasi SIMPONI dalam pengelolaan Penyetoran Penerimaan Negara.

Realisasi Pendapatan TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 1,17 persen dibandingkan TA 2022. Hal ini disebabkan oleh penurunan signifikan dari estimasi anggaran pendapatan.

Perbandingan Realisasi Pendapatan
31 Desember TA 2023 dan 31 Desember 2022
(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	%
Pendapatan penjualan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan budidaya	1.062.134.310	193.784.490	9,99
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	39.534.600	0	0
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	7.440.001	450.000	36,00
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	47.700.979	344.594.961	831,81
Pendapatan penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tuisi	143.378.000	35.400.000	0
Penerimaan Kembali belanja pegawai TAYL		44.013.590	0
Penerimaan Kembali belanja barang TAYL		1.000	0
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi Lainnya	101.667.000	59.230.000	-0,32
Jumlah	1.047.308.409	677.474.041	1,17

B.2 Belanja

Realisasi Belanja instansi pada Semester I TA 2023 adalah sebesar Rp 102.485.602.584 atau 99,83% dari anggaran belanja sebesar Rp102.660.245.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja Semester II TA 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja

Semester II TA 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2023		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	76.940.739.000	76.782.169.626	99,79
Belanja Barang	25.719.506.000	25.703.432.958	99,93
Belanja Modal			
Belanja Bantuan Sosial			
Total Belanja Kotor	102.660.245.000	102.485.602.584	99,83
Pengembalian Belanja Pegawai	-	-	-
Jumlah	102.660.245.000	102.485.602.584	99,83

Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar 3,31 persen dibandingkan dengan periode yang berakhir 31 Desember 2022. Hal ini disebabkan antara lain:

Meningkatnya Belanja Barang berupa kegiatan Smart Fisheries Village (SFV) di beberapa lokasi Lingkup BRPBAPP serta dalam rangka mendukung operasional perkantoran dan pelayanan serta pemeliharaan atas aset yang dimiliki agar tetap dapat dalam kondisi baik sehingga pelayanan dan operasional perkantoran dapat berjalan dengan baik.

Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	%
Belanja Pegawai	76.782.169.626	81.619.044.690	-5,93
Belanja Barang	25.703.432.958	17.474.982.160	47,08
Belanja Modal	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	102.485.602.584	99.202.566.838	3,31

Belanja Pegawai
Rp76.782.169.626

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp76.782.169.626 dan Rp81.619.044.690. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS serta PPPK sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2023 mengalami penurunan sebesar 5,93 persen dari TA 2022. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

Adanya pegawai PNS yang berasal dari Penyuluh Perikanan yang memasuki masa usia pensiun atau purnabakti serta meninggal dunia.

Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	%
Belanja Gaji Pokok PNS	24.373.580.820	26.412.740.580	-7,72
Belanja Pembulatan Gaji PNS	369.497	373.825	-1,16
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1.727.827.848	1.890.259.142	-8,59
Belanja Tunj. Anak PNS	565.450.362	623.995.266	-9,38
Belanja Tunj. Struktural PNS	13.860.000	43.380.000	-68,05
Belanja Tunj. Fungsional PNS	5.405.128.000	6.504.145.000	-16,90
Belanja Tunj. PPh PNS	153.330.198	218.890.492	-29,95
Belanja Tunj. Beras PNS	1.353.240.120	1.487.361.960	-9,02
Belanja Uang Makan PNS	4.173.968.000	4.559.173.000	-8,45
Belanja Tunj. Umum PNS	85.560.000	99.965.000	-14,41
Belanja Uang Lembur	59.936.000	113.923.000	-47,39
Belanja Tunjangan Kinerja	38.890.138.599	36.699.180.040	5,97
Jumlah Belanja Kotor	76.802.389.444	81.653.387.305	-5,94

Pengembalian Belanja Pegawai	20.219.818	34.342.615	-41,12
Jumlah Belanja	76.782.169.626	81.619.044.690	-5,93

Belanja Barang
Rp25.703.432.958

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp25.703.432.958 dan Rp17.474.982.160. Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2023 mengalami kenaikan 47,08 persen dari Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2022. Hal ini disebabkan, antara lain:

Bertambahnya lokasi kegiatan Smart Fisheries Village pada Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan serta adanya tambahan belanja barang ekstrakomptabel peralatan dan mesin.

Perbandingan Realisasi Belanja Barang
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	%
Belanja Barang Operasional	3.039.862.380	3.440.171.661	-11,64
Belanja Barang Non Operasional	11.496.415.687	8.991.778.935	25,85
Belanja Persediaan Barang Konsumsi	1.019.028.495	1.645.754.410	-38,08
Belanja Jasa	3.572.987.839	1.692.568.679	111,10
Belanja Pemeliharaan	4.621.710.740	814.180.594	467,65
Belanja Perjalanan Dinas	1.953.427.817	890.527.881	119,36
Belanja Barang Utk diserahkan ke Masyarakat	0	0	0
Jumlah Belanja Kotor	25.703.432.958	17.474.982.160	47,08
Pengembalian Belanja Barang	0	0	0
Jumlah Belanja	25.703.432.958	17.474.982.160	47,08

Belanja Modal Rp0

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Tidak terdapat anggaran serta realisasi belanja modal pada Tahun Anggaran 2023 dan 2022.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	%
Belanja Modal Tanah	0	0	0
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	0
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
Belanja Peenambahan Nilai Gedung Lainnya	0	0	0
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja Modal	0	0	0

*Belanja Modal Tanah
Rp0*

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp000 dan Rp000. Tidak terdapat realisasi belanja modal tanah 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

Perbandingan Realisasi Belanja Tanah
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	%
Belanja Modal Tanah	0	0	0
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja Modal	0	0	0

*Belanja Modal
Peralatan dan Mesin
Rp0*

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0. Tidak terdapat belanja modal peralatan dan mesin pada Tahun Anggaran 2023.

Perbandingan Realiasi Belanja Peralatan dan Mesin
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	0
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja Modal	0	0	0

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp000

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp000 dan Rp000. Tidak terdapat Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023. Belanja Gedung dan Bangunan ini berasal dari renovasi beberapa Gedung Kantor satker lingkup Kantor Wilayah Akuntansi untuk menampung para pegawai baru dan meningkatkan kapasitas Gedung Kantor.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	0	0
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja Modal	0	0	0

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp.000

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp000 dan Rp000. Tidak terdapat realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023. belanja modal jalan, irigasi dan jaringan dapat berupa adanya peningkatan jaringan radio untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.

Perbandingan Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	%
Belanja Modal Jaringan	0	0	0
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja Modal	0	0	0

*Belanja Modal
Lainnya Rp.000*

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing- masing sebesar Rp.000 dan Rp.000. Tidak terdapat Realisasi Belanja Modal Lainnya Tahun Anggaran 2023. Belanja modal lainnya berupa pengadaan *software* untuk mendukung pekerjaan perkantoran sehari-hari.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	%
Software	0	0	0
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja Modal	0	0	0

*Belanja Bantuan
Sosial Rp000*

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.000 dan Rp.000. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Tidak terdapat Realisasi Belanja Bantuan Sosial pada Tahun Anggaran 2023 dan TA 2022. Belanja Bantuan Sosial yang disalurkan adalah dalam bentuk uang. Bantuan ini diberikan kepada kelompok masyarakat sebagai Bantuan Sosial untuk mendukung program Indonesia Pintar.

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	%
Belanja Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial dalam bentuk uang	0	0	0
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja Modal	0	0	0

PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Aset Lancar
Rp243.221.942

C.1. Aset Lancar

Jumlah Aset Lancar Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp243.221.942 dan Rp494.030.348.

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp0

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola, dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal Neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel xx

Perbandingan Kas di Bendahara Pengeluaran
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Des 2023	31 Des 2022
Uang Tunai	0	0
Uang Persediaan	0	0
Tambahahn Persediaan Uang	0	0
Rekening Bank	0	0
Jumlah	0	0

Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp0

C.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp000. dan Rp000, yang meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Tabel xx
Perbandingan Kas di Bendahara Penerimaan
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

Keterangan	30 Des 2023	31 Des 2022
Uang Tunai	0	0
Rekening Bank	0	0
Jumlah	0	0

Kas Lainnya dan Setara Kas
Rp0

C.1.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

Tabel xx

Perbandingan Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

Keterangan	30 Des 2023	31 Des 2022
Uang di rekening Bendahara Pengeluaran	0	0
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	0	0
Kas Lainnya dari Hibah	0	0
Jumlah	0	0

Piutang Bukan Pajak
Rp10.965.416

C.1.4. Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp10.965.416 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel xx

Perbandingan Rincian Piutang Bukan Pajak
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

Uraian	31 Des 2023	31 Des 2022
Piutang PNPB	0	0
Piutang Lainnya	10.965.990	0
Jumlah	10.965.990	0

Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayaran atau serah terimanya pada akhir tahun anggaran per tanggal Neraca.

Piutang bukan Pajak Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan merupakan akrual dari pengembalian uang makan dan tunjangan kinerja tahun 2023.

*Bagian Lancar
Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti
Rugi (TP/TGR)
Rp0*

**C.1.5. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

*Tabel xx
Rincian Bagian Lancar TP/TGR
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
(dalam rupiah)*

No.	Uraian	31 Des 2023	31 Des 2022
1.	TP/TGR	0	-
2.		0	0
3.		0	0
	Jumlah	0	0

*Bagian Lancar
Tagihan
Penjualan
Angsuran
Rp0*

C.1.6. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Bagian Lancar Tagihan Tagihan Penjualan Angsuran merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Rincian Bagian Lancar TPA untuk masing-masing Satker disajikan sebagai berikut:

Tabel xx
Rincian Bagian Lancar TP/TGR
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

No.	Uraian	31 Des 2023	31 Des 2022
1.	Tagihan Penjualan Angsuran	0	0
2.		0	-
3.		0	0
	Jumlah	0	0

Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih – Piutang
Jk. Pendek
Rp54.827

C.1.7. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp54.827 dan Rp0, yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang Jangka Pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang masing-masing debitur.

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih berdasarkan kategori piutang per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel xx

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jk. Pendek

(dalam rupiah)

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	10.965.990	0,5%	54.827
Kurang Lancar	0	10%	0
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	0		0
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	0	0,5%	0
Kurang Lancar	0	10%	0
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	0		0
Bagian Lancar TPA			
Lancar	0	0,5%	0
Kurang Lancar	0	10%	0
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	0		0
Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	10.965.990		54.827

Beban Dibayar di Muka
Rp0

C.1.8. Beban Dibayar di Muka

Beban Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Beban Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

Rincian Beban Dibayar di Muka Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel xx
Rincian Beban Dibayar di Muka
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
(dalam rupiah)

Uraian	31 Des 2023	31 Des 2022
Pembayaran Internet	0	0
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin	0	0
Pembayaran Sewa Gedung Kantor	0	0
Jumlah	0	0

Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp0

C.1.9. Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diterima tagihannya. Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel xx
Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
(dalam rupiah)

Jenis	31 Des 2023	31 Des 2022
Pendapatan Jasa Pelatihan	0	0
Pendapatan Jasa Pelayanan dan Pendidikan	0	0
Jumlah	0	0

Persediaan
Rp232.311.353

C.1.10. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp232,311,353 dan Rp494.030.348 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel xx
Rincian Persediaan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
(dalam rupiah)

Persediaan	31 Des 2023	31 Des 2022
Barang Konsumsi	48.843.700	143.631.300
Barang untuk Pemeliharaan	0	0
Bahan Baku	98.055.853	232.202.534
Suku Cadang	0	0
Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0	0
Persediaan Lainnya	85.341.800	118.196.514
Jumlah	232.311.353	494.030.348

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik dan telah di lakukan opname terhadap semua item persediaan dan ditatausahakan dalam sakti modul persediaan

Aset Tetap
Rp480.124.244.464

C.2. Aset Tetap

Saldo Aset Tetap Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp480.124.244.464 dan Rp482.857.206.916.

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Aset Tetap Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya.

Tanah
Rp283.798.727.500

C.2.1. Tanah

Tanah yang dimiliki oleh Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp283.798.727.500 dan Rp283.798.727.500

Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:

Tabel xx
Rincian Mutasi Tanah

(dalam rupiah)

Saldo Awal	283.798.727.500
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Hibah	0
Reklasifikasi Masuk	-
Mutasi Kurang:	
Revaluasi Aset	
Penghapusan	-
Saldo Per 31 Desember 2022	283.798.727.500
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	-
Nilai Buku Per 31 Desember 2023	283.798.727.500

Keseluruhan aset tetap berupa tanah yang dimiliki BRPBAPP sudah mempunyai sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional.

Rincian saldo tanah per 30 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Luas (M2)	Lokasi	Nilai
26.660	Jl.Makmur Dg Sitakka No.129 maros (Kel.Raya) Tanah Perumahan Komp II	15.162.209.000
19.627	Jl.Makmur Dg Sitakka No.129 maros (Kel.Raya) Tanah Perumahan Komp II	12.843.418.000
39.308	Dusun Manrimisi Maros (ITP Marana Kab Maros) Perumahan Maranak	1.833.325.000
323.251	JL Makmur Dg Sitakka NO 129 Maros (Kel.Raya) Kantor Maros	229.980.946.500
127.445	Desa Punaga Takalar, Tambak Takalar	3.280.944.000
445.000	Desa Mattiro Tasi, Tanah Tambak dan Kantor Maranak	15.562.763.000
1.609	Desa Lawallu Kec Soppeng Riaja Barru, Tanah tambak	925.239.000
1.208	Desa Lawallu Kec.Soppeng Riaja Barru, Tanah Perumahan	539.976.000
90.000	Desa Lawallu Kec.Soppeng Riaja Barru, Tanah kantor	2.449.116.000
15.692	Desa Mattirotasi Kec. Maros Baru Tanah untuk Jalan Kompleks	1.220.791.000
	Jumlah	283.798.727.500

Peralatan dan
Mesin
Rp30.358.608.503

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp30.358.608.503 dan Rp30.417.795.503.

Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel xx
Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin
(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2022	30.417.795.503
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Hibah	0
Transfer Masuk	0
Reklasifikasi Masuk	0
Perolehan Lainnya	22.300.000
Mutasi Kurang:	
Penghentian aset dari penggunaan	81.487.000
Penghapusan	
Saldo Per 31 Desember 2023	30.358.608.503
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(27.462.506.133)
Nilai Buku Per 31 Desember 2023	2.896.102.370

Mutasi tambah:

Perolehan Lainnya atas 1 unit Perahu Fiber sebesar Rp.22.300.000 yang berasal dari belanja barang (52).

Mutasi kurang :

Penghentian aset dari penggunaan berupa 9 unit Notebook senilai Rp.81.487.000

Tabel xx
Mutasi Tambah Peralatan dan Mesin 31 Desember 2023
(dalam rupiah)

No.	Peralatan dan Mesin	Nilai
1.	Perolehan Lainnya	22.300.000
2.	Alat Angkutan Darat Bermotor	0
	Jumlah	0

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp126.318.570.439 dan Rp125.398.083.339.

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel xx
Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan 31 Desember 2023
(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2022	125.398.083.339
Mutasi tambah:	
Pengembangan Gedung dan Bangunan	462.170.100
Koreksi pencatatan nilai tambah	70.676.000
Perolehan Lainnya	387.641.000
Perolehan Lainnya	
Mutasi Kurang:	
Koreksi Pencatatan	30.000.000
Saldo Per 31 Desember 2023	126.318.570.439

Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(23.545.965.509)
Nilai Buku Per 31 Desember 2023	102.772.604.930

Mutasi tambah:

Penambahan nilai aset untuk gedung kantor maros Rp.399.500.100, pengembangan nilai aset untuk rumah jaga instalasi tambak takalar sebesar Rp62.670.000.

Koreksi nilai karena adanya tambahan bangunan untuk digunakan sebagai asrama di instalasi tambak takalar yang menggunakan akun 52 sebesar RP.70.676.000.

Belanja MAK 52 yang membentuk aset sebesar Rp.387.641.000

Mutasi kurang:

- Belanja Pembuatan 2 unit Gazebo sebesar Rp.30.000.000

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp107.731.192.754
54

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp107.731.192.754 dan Rp107.266.819.200 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel xx

Rincian Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2022	107.266.819.200
Mutasi tambah:	
Pengembangan nilai aset (Jalan)	204.940.434
Koreksi Nilai bertambah (Jalan)	159.720.120
Perolehan Lainnya (Irigasi)	99.713.000
Mutasi Kurang:	
Koreksi Pencatatan	-
Saldo Per 31 Desember 2023	107.731.192.754
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(21.733.276.090)
Nilai Buku Per 31 Desember 2023	85.997.916.664

Mutasi tambah:

- Belanja Pemeliharaan yang menambah nilai aset untuk jalan khusus inspeksi tambak marana (pengecoran) sebesar Rp.159.720.120.
- Belanja Pemeliharaan yang menambah nilai aset untuk jalan khusus kompleks kantor BRPBAPP Maros (pengaspalan) sebesar Rp. 204.940.434.
- Belanja pemeliharaan membentuk aset berupa 1 unit jembatan minapadi maros sebesar Rp.99.713.000.

Aset Tetap
Lainnya
Rp745.515.000

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp745.515.000 dan Rp745.515.000 dengan rincian sebagai berikut sebagai berikut:

Tabel xx
Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya
(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2022	745.515.000
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Mutasi Kurang:	
Koreksi Pencatatan	-
Saldo Per 31 Desember 2023	745.515.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(0)
Nilai Buku Per 31 Desember 2023	745.515.000

Konstruksi Dalam
Pengerjaan
Rp122.384.000

C.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp122.384.000 dan Rp122.384.000 yang merupakan pembangunan gedung dan bangunan tempat kerja dan tempat tinggal yang proses pengerjaannya pada Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan belum selesai sampai dengan tanggal neraca.

Rincian KDP pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

- Pengembangan Talud tambak superintensif (Perencanaan 85% = Rp63.712.000,00)
- Pembangunan Tambak Milenial shirmp Farm (Perencanaan 85% = Rp43.472.000,00)
- Renovasi Laboratorium tanah/pelayanan publik/laboratorium basah(Perencanaan 85% = Rp15.200.000,00)
- Konstruksi Dalam Pengerjaan dari SUPM Bone sebesar Rp.78.760.000.

Konstruksi dalam pekerjaan (KDP) tersebut di atas tidak dapat dilanjutkan pekerjaan nya pada Tahun Anggaran 2021 akibat adanya reconfusing anggaran dan tidak ada perencanaan anggaran fisik pekerjaan tersebut untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai surat pernyataan Kepala Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan dengan No. B.2998/BRSDM/BRPBAPP/KU.520/VII/2023 tanggal 6 Juli 2023.

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
Rp72.741.747.732

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp72.741.747.732 dan Rp64.892.117.626

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023.

Tabel xx

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

(dalam rupiah)

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	30.358.608.503	27.462.506.133	2.896.102.370
2.	Gedung dan Bangunan	126.318.570.439	23.545.965.509	102.772.604.930
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	107.731.192.754	21.733.276.090	85.997.916.664
4.	Aset Tetap Lainnya	745.515.000	0	745.515.000
	Jumlah	265.153.886.696	72.741.747.732	192.412.138.964

Piutang Jangka Panjang
Rp0

C.3. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan per 31 Desember 2023 dan

31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

*Piutang Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti
Rugi (TP/TGR)
Rp0*

C.3.1. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian Tagihan TP/TGR untuk masing-masing Satker adalah sebagai berikut:

Tabel xx

Rincian Piutang Tagihan TP/TGR

31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Des 2023	31 Des 2022
1.	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan	0	-
	Jumlah	0	0

*Tagihan
Penjualan
Angsuran Rp0*

C.3.2. Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0. dan Rp0, berupa penjualan aset tetap yang pembayarannya diselesaikan setelah dua belas bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian TPA per Satker 31 Desember Tahun 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel xx
Rincian Piutang TPA 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

No.	Uraian	31 Des 2023	31 Des 2022
1.	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan	0	0
	Jumlah	0	0

Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih – Piutang
Jangka Panjang
Rp0

C.3.3. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih atas Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) adalah sebagai berikut.

Tabel xx
Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jk.
Panjang
31 Desember 2023

(dalam rupiah)

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	0	0,5%	0
Kurang Lancar	0	10%	0
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	0		0
Tagihan TPA			
Lancar	0	0,5%	0
Kurang Lancar	0	10%	0
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	0		0
Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0		0

Aset Lainnya
Rp604.474.446

C.4. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp604.474.446 dan Rp637.452.111

Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap. Aset Lainnya pada Kantor Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan dari Aset Tak Berwujud dan Aset Lainnya.

Aset Tak Berwujud
Rp686.788.265

C.4.1. Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp686.788.265 dan Rp686.788.265

Tabel xx
Rincian Aset Tak Berwujud 30 September 2023
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Nilai
1.	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan (Paten)	686.788.265
	Jumlah	686.788.265

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Adapun mutasi Aset Tak Berwujud pada Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan adalah sebagai berikut.

Di jelaskan nilai asset ATB periode laporan ini Rp686.788.265 merupakan hak paten yang sudah tersertifikasi berupa 6 judul penelitian yang di biayai oleh APBN BPPBAP Maros kurun waktu 2011 dan 2014 dengan berita acara perhitungan nilai aset tak berwujud berupa paten Nomor.6666/BRSDM.1/PL.920/X/2019 adalah :

- Antibodi poliklonal (Ab Po) untuk diagnosis virus pada udang windu dan proses produksinya Rp. 132.575.000,00 (sertifikat).
- Promoter anti virus udang windu uji aktifitas promoter secara in vibrio Rp 78.124.175,00 (Sertifikat).
- Kit Deteksi dan metode dini vibriosis pada udang Penaed Rp.95.624.000,00 (sertifikat).

- Pasang-pasangan primer untuk deteksi Vibrio berpondar pada udang Penaed Rp.69.388.450,00 (Sertifikat)
- Probiotik Brevibacilus latorusvorus pengendali penyakit Vibrio pada udang dan proses produksinya Rp.135.697.550 (Sertifikat).
- Metode penggunaan probiotik berbahan baku bakteri untuk memperbaiki mutu air tambak Rp.175.379.090,00 (Sertifikat).

Tabel xx
Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud
(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2022	686.788.265
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Saldo Per 31 Desember 2023	686.788.265
Amortisasi s.d. 31 Desember 2023	(403.498.417)
Nilai Buku Per 31 Desember 2023	283.289.848

Mutasi tambah:

-

Aset Lain-Lain
Rp2.534.814.350

C.4.2. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp2.534.814.350 dan Rp2.626.555.350. Aset Lain-lain berupa Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan serta dalam proses penghapusan dari BMN, dan kas BLU yang dibatasi penggunaannya.

Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

Tabel xx
Rincian Mutasi Aset Lain-lain
(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2022	2.626.555.350
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi dari Aset Tetap	81.487.000
Mutasi Kurang:	
Penggunaan kembali BMN yang dihentikan	0
Penghapusan BMN	173.228.000
Saldo Per 31 Desember 2023	2.534.814.350
Amortisasi s.d. 31 Desember 2023	(2.213.629.752)
Nilai Buku Per 31 Desember 2023	321.184.598

Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
Rp2.649.951.147

C.4.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2.649.951.147 dan Rp2.675.891.504. Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel xx
Rincian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset
Lainnya 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan	Nilai Buku
A.	Aset Tak Berwujud			
1.	Software	0	0	0
2.	Hak Cipta	0	0	0
2.	Paten	686.788.265	424.904.331	356.226.066
	Jumlah	686.788.265	424.904.331	356.226.066
B.	Aset Lain-lain	2.534.814.350	2.225.046.816	309.767.534
	Jumlah	2.534.814.350	2.225.046.816	309.767.534
	Total	3.221.602.615	2.649.951.147	571.651.468

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Kewajiban
Jangka Pendek
Rp106.621.118

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Kewajiban Jangka Pendek Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp106.621.118. dan Rp139.944.141.

Uang Muka dari
KPPN Rp0

C.5.1. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Rincian Uang Muka dari KPPN untuk masing-masing Satker Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan adalah sebagai berikut:

Tabel xx

Rincian Uang Muka dari KPPN 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

No.	Uraian	31 Des 2023
1.	Uang Persediaan BRPBAPPP	0
1.	Tambahan Uang Persediaan BRPBAPPP	0
	Jumlah	0

Utang kepada Pihak Ketiga Rp106.621.118

C.5.2. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp106.621.118 dan Rp139.944.141. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Pada penyajian laporan periode ini terdapat adanya utang kepada Pihak Ketiga berupa Tagihan Listrik bulan Desember 2023 yang dibayarkan di bulan Januari 2024 sebesar Rp106.413.384 dan kekurangan gaji yang dibayarkan di bulan Januari 2024 sebesar Rp.207.734 yang disebabkan oleh akrual belanja pegawai pada bulan Desember 2023.

Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel xx

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
1.	Pendapatan Jasa Giro yang belum disetor	0
2.	Potongan Pajak yang belum disetor	0
3.	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	106.621.118
	Total	106.621.118

Pendapatan Diterima di Muka Rp0

C.5.3. Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp0

Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBPN.

Rincian Pendapatan Diterima di Muka dari pihak ketiga disajikan sebagai berikut:

Tabel xx

Rincian Pendapatan Diterima di Muka 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Jumlah	Keterangan
Badan Swasta	0	Jasa Pelatihan Akuntansi
Instansi Pemerintah	0	Penyusunan Neraca Awal
Lainnya		
Badan Lainnya	0	Jasa Pelatihan Akuntansi
Jumlah	0	

Beban yang Masih Harus Dibayar Rp0

C.5.4. Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel xx

Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar

31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

Uraian	31 Des 2023	31 Des 2022
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	0	0
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	0
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	0	0
Jumlah	0	0

Utang Yang belum ditagihkan Rp0

C.5.5. Utang Yang Belum Ditagihkan

Utang yang belum ditagihkan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.0 dan Rp0.

C.7 Ekuitas

Ekuitas Rp480.865.319.734

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp480.865.319.734 dan Rp483.848.745.234. Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pendapatan
PNBP
Rp1.394.414.889

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 30 September 2022 adalah sebesar Rp1.394.414.889 dan Rp.633.009.451 . Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak

31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Des 2023	31 Des2022	%
Pendapatan Sewa tanah, gedung dan bangunan	47.700.979	344.594.961	-2,50
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	39.534.600		100
Pendapatan Penggunaan Sarana/prasarana sesuai dengan Tusi	143.378.000	35.400.000	305,02
Pendapatan Penjualan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan budidaya.	1.062.134.310	193.784.490	448,10
Pendapatan Pengujian, sertifikasi, kalibrasi dan standardisasi lainnya.	101.667.000	59.230.000	71.65
Jumlah	1.394.414.889	633.009.451	1.202

Pendapatan akrual pada Satker Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan berasal dari Pendapatan dari penjualan, pengelolaan BMN dan Iuran Badan usaha, pendapatan pendidikan dan Pendapatan Lain-Lain yang merupakan jenis pendapatan yang berasal dari pengembalian belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal yang berasal dari transaksi tahun-tahun sebelumnya.

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember Tahun 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp76.759.427.829 dan Rp81.636.538.606. Beban Pegawai

Beban Pegawai
Rp76.759.427.82

adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Berdasarkan informasi LO beban pegawai pada periode laporan 31 Desember 2023 mengalami penurunan 5,97 % dibanding periode Desember 2022 adanya pegawai yang telah memasuki batas usia pensiun dan meninggal dunia.

Rincian Beban Pegawai
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
(dalam Rupiah)

Uraian	31 Des 2023	31 Des 2022	%
Beban Gaji Pokok PNS	24.354.751.220	26.412.740.580	-7,79
Beban Pembulatan Gaji PNS	365.291	373.825	-2,28
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	1.726.596.083	1.890.259.142	-8,66
Beban Tunj. Anak PNS	564.926.409	623.995.266	-9,47
Beban Tunj. Struktural PNS	13.860.000	43.380.000	-68,05
Beban Tunj. Fungsional PNS	5.401.268.000	6.504.145.000	-16,96
Beban Tunj. PPh PNS	152.883.463	218.890.492	-30,16
Beban Tunj. Beras PNS	1.352.733.180	1.487.361.960	-9,05
Beban Uang Makan PNS	4.163.465.800	4.559.173.000	-8,68
Beban uang lembur	59.936.000	113.923.000	-47,39
Beban Tunj. Umum PNS	79.440.000	99.965.000	-20,53
Beban Tunjangan Kinerja	38.889.202.383	39.699.180.040	-2,04
Jumlah Beban	76.759.427.829	81.653.387.305	-5,99
Pengembalian Beban	0	16.848.699	0
Jumlah Beban	76.759.427.829	81.636.538.606	-5,97

Beban
Persediaan
Rp1.386.424.290

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember Tahun 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.386.424.290 dan Rp897.684.468. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember Tahun 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
(dalam Rupiah)

Uraian	31 Des 2023	31 Des 2022	%
Beban Persediaan Konsumsi	541.190.750	440.157.100	22,95
Beban Persediaan Bahan Baku	615.988.826	329.730.196	86,81
Beban Persediaan Lainnya	229.244.714	127.797.172	79,38
Jumlah Beban	1.386.424.290	897.684.468	54,44

Beban persediaan pada periode 31 Desember 2023 mengalami kenaikan 54,44 persen karena adanya kegiatan Smart Fisheries Village di beberapa lokasi lingkup BRSDM.

Beban Barang
dan Jasa
Rp18.087.719.264

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp18.087.719.264 dan Rp14.094.749.754. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Secara keseluruhan terjadi Kenaikan Beban Barang dan Jasa, hal ini disebabkan peningkatan beberapa pos beban seperti beban langganan listrik, beban jasa profesi, beban honor dan beban bahan seiring dengan meningkatnya aktivitas pelayanan dan diklat. Walaupun secara total beban barang dan jasa mengalami kenaikan tetapi pada beberapa pos beban terjadi penurunan karena penghematan atas

beban-beban operasional perkantoran, penurunan pengiriman surat karena sudah disampaikan secara *online*, penurunan beban sewa yang disebabkan adanya pembelian aset sehingga tidak dilakukan penyewaan. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa
31 Desember TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Des 2023	31 Des 2022	%
Beban Keperluan Perkantoran	2.396.503.404	2.998.188.443	-20,07
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	125.326.016	134.537.200	-6,85
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos	4.445.460	1.653.200	168,90
Beban Honor Operasional Satker	203.672.000	194.080.000	4,94
Beban Barang Operasional Lainnya	309.915.500	96.280.000	221,89
Beban Barang Operasional Lainnya- Penanganan Covid19	0	15.433.818	0
Beban Bahan	1.939.202.585	734.815.406	163,90
Beban Honor Output Kegiatan	5.413.520.560	5.449.899.600	-0,67
Beban Barang Non Operasional Lainnya	3.762.448.447	2.807.063.929	34,04
Beban Langganan Listrik	1.519.885.563	1.366.146.325	11,25
Beban Langganan Telepon	981.725	921.290	6,56
Beban Langganan Air	39.973.900	27.324.100	46,30
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	70.639.354	66.972.141	5,48
Beban Sewa	346.650.000	36.000.000	862,92
Beban Jasa Profesi	55.050.000	8.800.000	525,57
Beban Jasa Lainnya	1.518.260.655	156.634.302	869,30
Beban Peralatan dan Mesin_ekstrakomputabel	381.244.095	0	0
Jumlah Beban	18.087.719.264	14.094.749.754	28,32

Beban barang dan jasa pada 31 Desember 2023 ini mengalami kenaikan 28,32% dibanding 31 Desember 2022, hal ini disebabkan karena percepatan Realisasi Anggaran dimana Revolving GUP dilakukan tiap bulan dan

melakukan permintaan TUP setiap bulan dengan adanya kegiatan Smart Fisheries Village (SFV) dan belanja barang peralatan lainnya-belanja ektrakomptabel.

Beban Jasa Lainnya berupa Jasa Outsourcing Cleaning Service Indoor dan Outdoor, tenaga urgensi, tenaga pengamanan kantor, driver, pengganti pension, jasa perbaikan tambak, jasa pembuatan materi dan video penyuluhan, langganan zoom, instruktur senam, pelatihan satpam, uji banding, biaya kalibrasi, pelaksanaan assessment/ surveilen, biaya pengiriman ikan, jasa mesin sangra, jasa pembuatan jembatan kayu,.

Beban
Pemeliharaan
Rp4.532.553.940

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan 31 Desember Tahun 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp4.532.553.940 dan Rp1.659.235.529. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Kenaikan beban pemeliharaan karena adanya pengeluaran untuk mempertahankan performa dan kapasitas atas aset-aset lama serta pengeluaran untuk asuransi atas gedung dan bangunan. Rincian beban pemeliharaan untuk 31 Desember Tahun 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
(dalam Rupiah)

Uraian	31 Des 2023	31 Des 2022	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.152.624.707	835.740.500	277,23
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.379.929.233	818.351.129	68,62
Beban Persediaan Suku Cadang	0	0	0
Beban Persediaan bahsn untuk Pemeliharaan	0	5.143.900	0

Beban Pemeliharaan Lainnya	0	0	0
Jumlah Beban	4.532.553.940	1.659,235,529	173,17

Pengalokasikan anggaran pemeliharaan terhadap aset yang di kelola untuk mempertahankan kondisi dan masa manfaat aset dalam rangka menunjang kegiatan operasional balai.

*Beban
Perjalanan
Dinas
Rp1.953,427,817*

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas 31 Desember Tahun 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar

Rp1.953,427,817 dan Rp814,180,594. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan oleh meningkatnya frekuensi perjalanan dinas pegawai untuk menghadiri kegiatan rapat koordinasi atau pelatihan yang diselenggarakan Kantor Pusat dimana perjalanan dinasnya ditanggung sendiri oleh masing-masing satuan kerja. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember Tahun 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Des 2023	31 Des 2022	%
Beban Perjalanan Dinas Biasa	1.866.258.567	809.283.594	130,61
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	34.434.250	3.420.000	906,85
Beban Perjalanan Dinas -Pandemi Covid19	0	1.477.000	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	15.900.000	0	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	36.835.000	0	0
Jumlah Beban	1.953,427,817	814,180,594	139,92

*Beban Barang
untuk Diserahkan
Kepada
Masyarakat Rp0*

D.7 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat 31 Desember Tahun 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini, Satker memberikan bantuan kepada kelompok masyarakat dan pengusaha UMKM berupa bantuan peralatan dan perlengkapan untuk penerapan akuntansi dan pelaporan. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Des 2023	31 Des 2022	%
Beban Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual	0	0	0
Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual	0	0	0
Jumlah Beban	0	0	0

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Rp0

Beban Bantuan Sosial 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Peningkatan beban bansos yang diberikan kepada kelompok masyarakat sebagai Bantuan Sosial untuk mendukung program Indonesia Pintar. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Des 2023	31 Des 2022	%
Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial – dalam bentuk Uang	0	0	0
Jumlah Beban	0	0	0

Beban
Penyusutan dan
Amortisasi
Rp7,827,830,929

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp7,827,830,929 dan Rp8,579,573,133. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember tahun 2023 dan 30 September 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Des 2023	31 Des 2022	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.277.283.920	2.019.180.060	-62,85
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	3,292,798,992	3.274.883.645	-49,97
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.191.947.374	3.165.332.691	-50,00
Beban Penyusutan Aset Tetap yg digunakan dalam operasi Pemerintah	22,988,816	77.364.910	-85,04
Jumlah Penyusutan	7.785.019.102	8.536.761.306	-53,34
Beban Amortisasi Hak Cipta	0	0	0
Beban Amortisasi Paten	42,811,827	42.811.827	-50,00

Beban Penyusutan Aset Lain-lain	0	0	0
Jumlah Amortisasi	42.811.827	42.811.827	-50,00
Jumlah Beban	7,827,830,929	8.579.573.133	-53,31

Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Rp54.827

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp54.827 dan (Rp27.554). Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Des 2023	31 Des 2022	%
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lancar	54.827	-27.554	0)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Non Lancar	0	0	0
Jumlah Beban	54.827	-27.554	-100

Kegiatan Non Operasional Rp7,440,001

D.11 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Des 2023	31 Des 2022	%
Surplus Pelepasan Aset Non Lancar	7.440.001	450.000	1553,33
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	106,529,590	217,83
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0	0

Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0	0
Jumlah Beban	7.440.001	106,979,590	21,69

Pos Luar Biasa
Nihil

D.12 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Tidak terdapat pendapatan atau beban dari Pos Luar Biasa untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp483.848.745.234

E.1. Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 dan 1 Januari 2022 masing-masing adalah sebesar Rp483.848.745.234 dan Rp492.200.635.688.

Defisit LO
Rp109,145,584,006

E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah defisit sebesar Rp109,145,584,006 dan Rp106,941,995,489. Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi
Rp0

E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi

Transaksi Dampak Kumulatif Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0.

Penyesuaian Nilai Aset
Rp0

E.4.1. Penyesuaian Nilai Aset

Jumlah Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai Persediaan
Rp0

E.4.2. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya.

Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp28,920,628. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk 31 Desember tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel xx
Rincian Koreksi Nilai Persediaan TA 2023

No.	Jenis Persediaan	Koreksi
1.	Barang Konsumsi	0
2.	Suku Cadang	0
3.	Barang Persediaan Lainnya	0
Jumlah		0

Selisih Revaluasi Aset Rp0

E.4.3. Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi Rp1,254,593,834

E.4.4. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp1.254.593.834 dan Rp36.091.610. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai. Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi adalah sebagai berikut:

Tabel xx

Rincian Koreksi Aset Non Revaluasi 31 Desember 2023

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Koreksi Tanah Bangunan Kantor	0
Koreksi Peralatan dan Mesin	657.743.834
Koreksi bangunan	596.850.000
Jumlah	1.254.593.834

Koreksi Lain-lain Rp0

E.4.5. Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang, dan utang. Rincian Koreksi Lain-lain adalah sebagai berikut:

Tabel xx

Rincian Koreksi Lain-lain 31 Desember 2023

Jenis Koreksi	Jumlah
Koreksi Beban	0
Koreksi Pendapatan	0
Koreksi Piutang	0
Koreksi Kewajiban	0
Koreksi Hibah	0
Jumlah	0

E.5. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp101,083,747,694 dan Rp98,525,092,797

Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal K/L, antar K/L, antar BUN, maupun K/L dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Tabel xx
Transaksi Antar Entitas 31 Desember 2023

Jenis Persediaan	Koreksi
Diterima dari Entitas Lain	1.401.854.890
Ditagihkan ke Entitas Lain	(102.485.602.584)
Transfer Masuk	0
Transfer Keluar	0
Pengesahan Hibah Langsung	0
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	101,083,747,694

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.5.1. Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN).

Pada periode hingga 31 Desember 2023, DDEL sebesar Rp1,401,854,890 sedangkan DKEL sebesar Rp102,485,602,584.

E.5.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L, dan antara K/L dengan BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp0 terdiri dari:

Tabel xx
Transfer Masuk 31 Desember 2023

No.	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1.	Peralatan dan Mesin	-	0
2.	Persediaan	-	0
Jumlah			0

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp0.

E.5.3. Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung K/L dalam bentuk kas, barang, maupun jasa, sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp0 dari total Rp0 yang diterima sepanjang tahun 2023.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 adalah Rp0.

Rincian Pengesahan Hibah Langsung untuk 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel xx

Pengesahan Hibah Langsung 31 Desember 2023

No.	Penerima Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Pengesahan
1.	-	Uang	0
2.	-	Uang	0
		Barang	0
Total Pengesahan			0
Pengesahan Pengembalian Hibah			-
Jumlah			0

Ekuitas Akhir
Rp477,041,502,7
56

E.6. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp477,041,502,756 dan Rp483,848,745,234

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Tidak terdapat catatan kejadian penting setelah tanggal neraca.

F.1 Pengungkapan Lain-lain

1. Masih terdapat Konstruksi Dalam Pengerjaan s/d 31 Desember 2023. Konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.122.384.00 yang berupa:

- Pengembangan Talud tambak superintensif (Perencanaan 85% = Rp63.712.000,00)
- Pembangunan Tambak Milenial shrimp Farm (Perencanaan 85% = Rp43.472.000,00)
- Renovasi Laboratorium tanah/pelayanan publik/laboratorium basah (Perencanaan 85% = Rp15.200.000,00)
- Konstruksi Dalam Pengerjaan satker Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone Sebesar Rp.78.760.000

Konstruksi dalam pekerjaan (KDP) tersebut di atas tidak dapat dilanjutkan pekerjaannya pada Tahun Anggaran 2021 akibat adanya refofusing anggaran dan tidak ada perencanaan anggaran fisik pekerjaan tersebut untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai surat pernyataan Kepala Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan dengan No. B.2998/BRSDM/BRPBAPPP/KU.520/VII/2023 tanggal 6 Juli 2023.

2. Tahun 2022-2023 BRPBAPPP mengelola anggaran untuk kegiatan Smart Fisheries Village (SFV) sesuai dengan pedoman pelaksanaan SFV dengan surat keputusan kepala BRSDM No. 38 Tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan desa perikanan cerdas atau Smart Fisheries Village dimana BRPBAPPP mengelola anggaran SFV sebesar Rp. 14.800.000.000 untuk KRO Fasilitasi dan pembinaan Start Up dan RO Usaha rintisan Start Up Kelautan dan Perikanan. Terdapat belanja barang non operasional lainnya untuk pembelian barang yang akan dibentuk menjadi peralatan dan mesin yang memenuhi nilai kapitalisasi aset. Smart Fisheries Village BRPBAPPP mengelola 6 SFV satker UPT yaitu BRPBATPP Bogor,

BRPPUPP Palembang, BBRBLPP Gondol, BRBIH Depok, BRPI Sukamandi, LRBRL Gorontalo dan mengelola SFV Desa Ajakkang di Kabupaten Barru serta SFV Minapadi di Maros dan Marana.

3. Pembukaan Rekening lainnya dalam rangka kegiatan Smart Fisheries Village yang berada di beberapa UPT lingkup Puriskan akan di proses pada Tahun 2024.
4. BRPBAPPP tidak ada perubahan nilai pada Neraca Satker pada Periode LK Audited.